

Budaya Politik dan Partisipasi Masyarakat Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia

Keshita Evanglie Rafaela Dengah¹ Angel Chlaudya² Vincent Septian Hernawan³ Stanley Putra Hamonangan Damanik⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: keshita.205240180@stu.untar.ac.id¹ angel.205240107@stu.untar.ac.id²
vincent.205242003@stu.untar.ac.id³ stanley.205240296@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Budaya politik berperan penting dalam menentukan kualitas Pilkada di Indonesia melalui partisipasi aktif masyarakat. Namun, rendahnya literasi politik, politik uang, dan sikap apatis masih menjadi hambatan yang mengurangi integritas demokrasi. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana prinsip demokrasi berjalan dan sebagai dasar penguatan tata kelola pemilu. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini tergolong sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang mengandalkan pengumpulan data melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Budaya politik masyarakat berperan penting dalam menentukan kualitas partisipasi pada Pilkada di Indonesia. Budaya politik yang partisipatif mendorong masyarakat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilih, sedangkan budaya politik yang apatis atau pragmatis justru melemahkan makna demokrasi. Partisipasi ini juga dipengaruhi oleh faktor pendorong seperti partai politik, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, dan media yang memberikan edukasi serta sosialisasi politik, namun seringkali terhambat oleh praktik politik uang, hoaks, rendahnya literasi politik, dan sikap pasif warga.

Kata Kunci: Budaya Politik; Demokrasi; Pilkada

Abstract

Political culture plays a crucial role in determining the quality of regional elections in Indonesia through active public participation. However, low political literacy, vote buying, and apathy remain obstacles that undermine democratic integrity. This study is crucial for assessing the extent to which democratic principles are implemented and as a basis for strengthening election governance. The research method used in this study is library research, which relies on data collection through the review of various literature sources related to the topic. The results of this study indicate that public political culture plays a significant role in determining the quality of participation in regional elections in Indonesia. A participatory political culture encourages citizens to be more active, critical, and responsible in exercising their right to vote, while an apathetic or pragmatic political culture weakens the meaning of democracy. This participation is also influenced by driving factors such as political parties, election organizers, community leaders, and the media, which provide political education and outreach, but are often hampered by the practice of vote buying, hoaxes, low political literacy, and citizen passivity.

Keywords: Political Culture; Democracy; Regional Elections



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Budaya politik merupakan elemen mendasar yang sangat memengaruhi dinamika penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di Indonesia, Pilkada hadir sebagai salah satu wujud nyata praktik demokrasi yang memberi kesempatan kepada warga untuk menentukan sendiri pemimpin daerahnya. Dalam mekanisme tersebut, pola budaya politik masyarakat memiliki posisi krusial, karena turut membentuk arah hasil pemilihan sekaligus kualitas demokrasi yang diwujudkan. Karakter budaya politik nasional dapat tercermin melalui berbagai indikator, seperti tingkat keterlibatan warga dalam aktivitas

politik, cara pandang terhadap figur pemimpin, serta sejauh mana pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi (Rusadi Kantaprawira (1983). Dalam pelaksanaan Pilkada, partisipasi publik yang aktif menjadi prasyarat penting demi terselenggaranya pemilihan yang berkualitas. Komunitas dengan budaya politik yang matang biasanya lebih terlibat dalam setiap tahapan, mulai dari mengikuti sosialisasi, menghadiri kegiatan kampanye, hingga menyalurkan suara pada hari pemungutan. Namun demikian, praktik budaya politik di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah hambatan. Salah satu persoalan utama ialah rendahnya literasi politik, di mana sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme dan urgensi dari proses pemilihan. Selain itu, fenomena korupsi serta praktik politik uang tetap menjadi tantangan serius yang berpotensi merusak integritas dan mutu demokrasi itu sendiri (Javanica, A. 2020).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi Indonesia, pada akhirnya tidak hanya sekadar menjadi ajang kontestasi politik, melainkan juga cerminan sejauh mana nilai-nilai demokrasi terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, budaya politik masyarakat kembali menegaskan peranannya sebagai faktor penentu kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilihan. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa budaya politik pada dasarnya mencerminkan sikap, orientasi, dan perilaku masyarakat terhadap sistem politik serta lembaga-lembaga negara. Tingkat partisipasi, cara pandang terhadap figur pemimpin, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam demokrasi merupakan wujud nyata dari budaya politik yang berkembang di tengah masyarakat. Semakin baik budaya politik yang dimiliki, semakin besar pula kemungkinan terciptanya Pilkada yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Siregar, N. (2017).

Akan tetapi, dinamika budaya politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Rendahnya literasi politik membuat sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami arti penting keterlibatan dalam proses politik. Selain itu, praktik politik uang, pragmatisme, dan sikap apatis terhadap politik masih sering ditemui dalam setiap penyelenggaraan Pilkada. Kondisi ini tentu berimplikasi pada kualitas demokrasi, di mana hasil pemilihan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat yang rasional dan kritis. Dalam perspektif ketatanegaraan, Pilkada bukan hanya mekanisme hukum atau prosedural, melainkan juga ruang partisipasi publik yang memperlihatkan bagaimana nilai-nilai demokrasi dijalankan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, mengkaji hubungan antara budaya politik dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada menjadi relevan untuk menilai sejauh mana sistem ketatanegaraan Indonesia berjalan sesuai prinsip demokrasi yang berdaulat di tangan rakyat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang dinamika budaya politik masyarakat Indonesia dalam konteks Pilkada, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat partisipasi politik. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan demokrasi dan perbaikan kualitas tata kelola pemilu di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini tergolong sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan pengumpulan data melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik. Sumber literatur tersebut tidak terbatas hanya pada buku, melainkan juga mencakup artikel jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, maupun dokumen lain yang relevan. Esensi dari metode ini terletak pada upayanya untuk menghimpun beragam teori, konsep, serta gagasan yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan analisis sekaligus memberikan jawaban atas

permasalahan penelitian. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada analisis mendalam terhadap keterkaitan antarfenomena serta proses penarikan kesimpulan secara logis dan sistematis. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berusaha memahami konteks sosial dan makna yang terkandung dalam data kepustakaan, sehingga memungkinkan terbentuknya pemahaman yang utuh, komprehensif, dan interpretatif terhadap isu yang diteliti.

HSIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Budaya Politik Masyarakat dalam Memengaruhi Partisipasi Politik pada Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia

Budaya politik masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap partisipasi politik dalam setiap penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Budaya politik pada dasarnya menggambarkan pola pikir, sikap, dan orientasi masyarakat terhadap politik serta lembaga-lembaga negara. Dalam konteks Pilkada, budaya politik menentukan bagaimana masyarakat menyikapi proses demokrasi, mulai dari kepedulian terhadap isu-isu politik, keterlibatan dalam kampanye, hingga penggunaan hak pilih. Masyarakat yang memiliki budaya politik partisipatif umumnya menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam pemilu, karena mereka menyadari pentingnya keterlibatan untuk menentukan arah pembangunan daerah (Hofstede, G. (1980) Peran budaya politik juga tercermin dari sejauh mana masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam berdemokrasi. Literasi politik yang baik akan membentuk kesadaran bahwa memilih pemimpin bukan sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi sebuah tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berpihak pada rakyat. Sebaliknya, jika budaya politik yang berkembang masih bercorak pasif atau apatis, partisipasi masyarakat akan cenderung rendah, dan hal ini berdampak pada legitimasi hasil Pilkada.

Selain itu, budaya politik masyarakat turut memengaruhi kualitas demokrasi yang tercermin dalam Pilkada. Misalnya, ketika budaya politik masih dipengaruhi praktik pragmatis seperti politik uang, maka partisipasi masyarakat tidak lagi berlandaskan pada kesadaran demokratis, melainkan pada keuntungan sesaat. Kondisi ini dapat mereduksi makna Pilkada sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat yang rasional. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki budaya politik yang sehat, maka partisipasi yang muncul akan lebih kritis dan bertanggung jawab, sehingga Pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang legitimate serta dipercaya publik (Nugroho, 2018). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa budaya politik berfungsi sebagai landasan penting dalam menentukan sejauh mana partisipasi masyarakat terwujud secara optimal dalam Pilkada. Upaya untuk meningkatkan partisipasi tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu atau partai politik, tetapi juga pada proses pembentukan budaya politik yang demokratis di tengah masyarakat. Pendidikan politik, transparansi informasi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang perlu diperkuat agar budaya politik masyarakat semakin matang dan partisipasi dalam Pilkada benar-benar menjadi cerminan demokrasi yang sehat.

Faktor yang Menjadi Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada ditinjau dari Perspektif Budaya Politik

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membentuk budaya politik di sekitarnya. Salah satu faktor pendorong utama adalah partai politik dan kandidat yang mampu membangun komunikasi efektif dengan masyarakat. Partai dan kandidat yang melakukan sosialisasi politik secara terbuka, menyampaikan visi-misi dengan jelas, serta dekat dengan aspirasi rakyat akan mendorong tumbuhnya kesadaran politik

yang sehat. Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu juga berperan besar dalam memastikan jalannya proses demokrasi yang transparan dan adil. Sosialisasi yang masif dan akses informasi yang merata dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat (Miriam Budiardjo, 1983). Di samping itu, faktor lain yang berperan sebagai pendorong adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi kemasyarakatan. Kehadiran mereka dapat memengaruhi perilaku politik masyarakat karena dianggap memiliki otoritas moral maupun sosial. Dukungan dan ajakan dari tokoh-tokoh ini sering kali berhasil meningkatkan partisipasi, khususnya di wilayah pedesaan yang masih kental dengan ikatan sosial komunal. Media massa dan media sosial juga menjadi sarana efektif dalam memperluas literasi politik masyarakat. Informasi yang disampaikan secara cepat dan luas mampu membentuk opini publik dan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam Pilkada.

Namun, di balik faktor pendorong, terdapat pula faktor-faktor yang justru menjadi penghambat partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah elit politik yang menggunakan praktik politik uang. Budaya pragmatis semacam ini dapat merusak makna partisipasi politik karena masyarakat terjebak pada kepentingan jangka pendek dan bukan pada kesadaran demokratis. Selain itu, maraknya penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks) melalui media sosial juga menjadi hambatan serius, karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada maupun terhadap kandidat yang bertarung. Selain politik uang dan penyebaran hoaks, rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat juga menjadi penghambat yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik. Banyak warga yang masih belum memahami secara utuh pentingnya Pilkada sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi dan menentukan arah pembangunan daerah. Akibatnya, sikap apatis sering muncul, terutama pada kelompok masyarakat yang merasa suaranya tidak akan membawa perubahan nyata. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi politik dari partai maupun lembaga penyelenggara pemilu, sehingga literasi politik masyarakat tetap rendah (Hungtington, et al 1990).

Tidak hanya itu, kekecewaan terhadap kinerja pemerintah sebelumnya juga berpengaruh besar terhadap sikap masyarakat dalam Pilkada. Ketika janji-janji politik tidak terpenuhi atau kebijakan pemerintah dianggap tidak berpihak pada rakyat, sebagian masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik. Hal ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi, karena mereka merasa bahwa memilih atau tidak memilih tidak akan memberikan dampak yang berbeda. Sikap apatis semacam ini dapat menurunkan legitimasi hasil Pilkada, sekaligus melemahkan semangat demokrasi di tingkat lokal. Selain faktor internal, faktor eksternal seperti lemahnya penegakan hukum terhadap praktik curang dalam Pilkada juga turut memperburuk keadaan. Ketika masyarakat melihat adanya pelanggaran, seperti politik uang atau manipulasi suara, namun tidak diikuti dengan sanksi yang tegas, maka rasa kepercayaan terhadap integritas pemilu semakin menurun. Hal ini membuat sebagian warga enggan berpartisipasi karena menganggap hasil pemilu sudah dapat diprediksi atau tidak adil sejak awal. Dengan demikian, mengatasi hambatan partisipasi politik membutuhkan komitmen kuat dari penyelenggara, partai politik, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga budaya politik yang sehat dan demokratis.

Rendahnya literasi politik masyarakat menjadi hambatan serius dalam meningkatkan partisipasi Pilkada karena banyak warga yang belum memahami prosedur pemilu, arti penting memilih, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ketidakpahaman ini sering berujung pada sikap apatis, terutama ketika masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah sebelumnya sehingga kehilangan kepercayaan terhadap proses politik (Rode, 1993). Kondisi tersebut semakin diperparah oleh lemahnya pendidikan politik yang seharusnya dilakukan

secara konsisten oleh partai politik maupun institusi negara, serta kurangnya sosialisasi yang masif mengenai pentingnya peran masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah. Akibatnya, sebagian warga memilih untuk bersikap pasif, yang pada gilirannya mengurangi kualitas demokrasi dan legitimasi hasil Pilkada. Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkada meliputi partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, dan media massa yang berperan penting dalam memperkuat budaya politik demokratis melalui sosialisasi, edukasi, dan penyebaran informasi yang mendorong keterlibatan warga. Namun, di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat seperti praktik pragmatis elit politik, maraknya penyebaran hoaks, serta rendahnya literasi politik masyarakat yang menurunkan kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya berpartisipasi. Oleh karena itu, tantangan utama dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas adalah mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar partisipasi publik benar-benar menjadi cerminan budaya politik yang sehat dan demokratis (Almond, 1993).

KESIMPULAN

Budaya politik masyarakat memiliki peranan sentral dalam membentuk kualitas partisipasi politik pada penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Pola pikir, sikap, dan orientasi masyarakat terhadap politik menentukan sejauh mana mereka peduli, terlibat, serta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Ketika budaya politik yang berkembang partisipatif, masyarakat cenderung lebih aktif dan kritis, sehingga Pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang legitimate dan dipercaya publik. Sebaliknya, budaya politik yang pasif, apatis, atau dipengaruhi praktik pragmatis seperti politik uang akan melemahkan makna demokrasi dan menurunkan legitimasi hasil pemilihan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor-faktor yang mendorong maupun menghambatnya. Partai politik, kandidat, KPU, Bawaslu, tokoh masyarakat, hingga media massa berperan sebagai pendorong dengan menyediakan ruang sosialisasi, edukasi politik, serta informasi yang membangun kesadaran publik. Namun, faktor penghambat seperti elit politik yang menggunakan politik uang, penyebaran hoaks, rendahnya literasi politik, dan sikap apatis masyarakat masih menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, membangun budaya politik yang sehat melalui pendidikan politik, peningkatan literasi, serta penegakan hukum yang tegas menjadi langkah penting agar partisipasi masyarakat dalam Pilkada benar-benar mencerminkan praktik demokrasi yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Budiarjo, M. (1983). *Partisipasi dan partai politik, sebuah bunga rampai*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hofstede, G. (1980). *Culture's consequences: International differences in work-related values*. Sage Publications.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1990). *Partisipasi politik di negara-negara berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Javanica, A. (2020). *Media sosial dan partisipasi politik: Studi kasus pemilu muda di Indonesia*. Penerbit Erlangga.
- Kantaprawira, R. (1983). *Sistem politik Indonesia: Suatu model pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Nugroho, R. (2018). *Politik uang dalam pemilihan umum: Tantangan dan solusi*. Gadjah Mada University Press.
- Rodee, C. C. (1993). *Pengantar ilmu politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Siregar, N. (2017). *Dinamika kenegaraan dan demokrasi di Indonesia*. Alfabeta.